



# PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/08.PKBM/DPMPTSP/IX/2023

TENTANG

### IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) THOHIR AL ANSORI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- Bahwa sebagaimana Surat Ketua Penyelenggara PKBM THOHIR AL ANSORI Nomor 001//PKBM-TA/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Baru Izin Penyelenggaraan PKBM THOHIR AL ANSORI masih dan akan melanjutkan kegiatannya;
  - bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor PK.04/4761/Bid.PAUD dan Dikmastanggal 20 September 2023 PKBM THOHIR AL ANSORI direkomendasikan untuk mengajukan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c serta untuk menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan PKBM dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jantung Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
  - Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) THOHIR AL ANSORI Blok Rabu RT 002 RW 006 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal dengan ketentuan:
- a. Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan memenuhi fungsi sosial masyarakat
  - b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menyampaikan Laporan Kegiatan secara berkala setiap bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  - d. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 27 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.  
Pembina Utama Muda

Tembusan  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

**SINDANGKASIH SUGIH MUKTI**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 001/SK/YTAL/XII/2022

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
THOHIR AL ANSORI**

- Menimbang** : 1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang tua.  
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Thohir Al Ansori Lojikobong sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dan non formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Thohir Al Ansori Lojikobong.  
2. Program kerja Yayasan Thohir Al Ansori Lojikobong masa khidmat 2021-2026.
- Memperhatikan** : 1. Hasil rapat Pengurus Yayasan Thohir Al Ansori Lojikobong.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mendirikan dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua** : PKBM dimaksud diberi nama PKBM THOHIR AL ANSORI, dan mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2023/2024
- Ketiga** : PKBM THOHIR AL ANSORI berkedudukan di Blok Rabu Rt 002 Rw 006 Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka 45455.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM THOHIR AL ANSORI akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Sumberjaya

Pada tanggal : 22 Desember 2022

Ketua

Yayasan Thohir Al Ansori Lojikobong



Aep Aris Sulaeman, S.Pd.